

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung, Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*. (Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan. 2005).
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2009).
- Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009).
- G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris, cet 3*. (Jakarta. Erlangga, 1983).
- Gedeian, Arthur G. *Organization Theory and Design*. (University of Colorado at Denver, 1991).
- Gibson, Ivancevich. *Organisasi: perilaku, struktur, proses. Edisi 5, Terjemahan, Jilid 2*, (Jakarta; Penerbit Erlangga, 1992).
- Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung, Refika Aditama, 2011).
- Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung, Refika Aditama, 2011).
- Husaeni, Martani. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial, 1987).
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung. PT. Revika Aditama, 2006).
- Loebbecke, Arens. *Auditing*. (Jakarta, Empat, 2000).
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005).
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 71
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Edisi Revisi, 2014, hlm. 136.

- R. Soegono Notodisoerjo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. (Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1993).
- Ravianto, J. *Kualitas dan Produktivitas*. (Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas, 1989).
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018).
- Siagian P Sondang, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi (Jakarta : Bumi Aksara. 2004).
- Soekarno., *Dasar-Dasar Managemnet*. (Jakarta: Firma Tekad, 1965).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2006).
- Stair, R. M., & G. W. Reynolds. *Principles of Information Systems, a managerial Approach*, 9th Edition. Course Technology, (USA. 2010).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitati dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 402.
- Suyadi, Prawirosoentono. *Kebijakan Kinerja Karyawan “Kiat Membangun Organisasi Menjelang Perdagangan Bebas Dunia.”* (Yogyakarta: BPF, 1999).
- Tyson, Shaun dan Tony Jackson. *Perilaku Organisasi*. (Yogyakarta: Andy Offset. 2000).

B. Jurnal

- Agus S Ekomadyo. *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian*, (Jurnal Itenas, No. 2 Vol. 10 Agustus, 2006) hal. 51.
- Evi Apita Maya, “Kedudukan dan Kewenangan MKN dalam pembinaan notaris”. *Jurnal IUS*, VOL. V No.2, Agustus 2017.
- Henry Donald Lbn Toraan, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Vol. 20 No. 3, September 2020.
- Irfan Iryadi, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”. *Jurnal Rechtsvnding* Vol. 9 No. 3, 2020. hal 487.

Irfan Iryadi, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (Jurnal Rechtsvnding Vol. 9 No. 3, Desember 2020 hal 492).

Muhaimin. “Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 2. 2020. hal 282.

Nur Agus Susanto. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”. Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah”. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1. 2017.

C. Peraturan Perundangan-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Dewan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jabatan Notaris.

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jabatan Notaris.

D. Lain-Lain:

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 04 Oktober 2022.

Memahami Kepastian dalam Hukum (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 05-10-2022 pukul: 01:24 WIB).

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Wawancara dengan Informan 1 (Bapak Sahat Sinaga , Notaris)
2. Hasil Wawancara dengan Informan 1 (Bapak Sahat Sinaga , Notaris)
3. Berita Acara Wawancara dengan Informan 2 (Bapak Leo , Notaris , Mantan Anggota Majelis Kehormatan Nasional)
4. Hasil Wawancara dengan Informan 2 (Bapak Leo , Notaris , Mantan Anggota Majelis Kehormatan Nasional)
5. Berita Acara Wawancara dengan Informan 3 (Ibu Rosta Triani Manurung , Notaris)
6. Hasil Wawancara dengan Informan 3 (Ibu Rosta Triani Manurung , Notaris)
7. Berita Acara Wawancara dengan Informan 4 (Bapak Veri Kiswanto , Bareskrim Polri)
8. Hasil Wawancara dengan Informan 4 (Bapak Veri Kiswanto , Bareskrim Polri)
9. Berita Acara Wawancara dengan Informan 5 (Bapak Narendra Jatna , Kejaksaan Agung)
10. Hasil Wawancara dengan Informan 5 (Bapak Narendra Jatna , Kejaksaan Agung)
11. Berita Acara Wawancara dengan Informan 6 (Ibu Olivia Sembiring , Kejaksaan Agung)
12. Hasil Wawancara dengan Informan 6 (Ibu Olivia Sembiring , Kejaksaan Agung)
13. Surat MKNW Wilayah Jawa Barat No UM.MKNW Jawa Barat 05.19-218
Rekapitulasi Data Penolakan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Dalam Proses Peradilan Di Seluruh Indonesia